

**PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH PROPINSI SE-SUMATERA BAGIAN SELATAN<sup>1)</sup>**

**Oleh : Heny Susantih<sup>2)</sup>  
Yulia Saftiana**

**ABSTRACT**

This research aimed to know comparison indicators financial performance of The Government of The South Sumatera Interregional Province and based on local finance capability indicators, effectiveness and activity of Pemda's financial on five provinces on South Sumatera Interregional Province. The data is used in this research was secondary data from 2004 until 2007 on five provinces on South Sumatera Interregional Province. The technique that used to analysis in this research is local finance capability, effectiveness analysis, activity analysis local finance and Kolmogorof Smirnov Test. The analysis result showed that financial performance at Lampung Province has the highest rank (63,81 percent) and Bengkulu Province has the lowest rank (49,22 percent). The analysis result local finance capability and finance effectiveness of Pemda's financial showed that Lampung Province has the highest rank (50.11 percent) for capability. It's (132,17 percent) for local finance effectiveness. Next the analysis result activity of local finance showed that South Sumatera Province has the highest public service ratio score (40,52 percent). Meanwhile the result of Kolmogorof Smirnov Test showed that was asymp sig score 0,859. That's mean there was not significance differences of financial performance of local government on five provinces at South Sumatera Regional.

(Key words : Financial Performance, capability, effectiveness and activity of Pemda's financial)

<sup>1)</sup>Disarikan dari Tesis Magister

<sup>2)</sup>Alumni PSIE PPS UNSRI

## PENDAHULUAN

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak Bulan Januari tahun 2001 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Dengan diberlakukannya kedua undang-undang tersebut telah membuka era baru bagi pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia, maka tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah bertambah banyak. Seperti yang dikemukakan oleh Darumurti dan Rauta (2000: 49) bahwa dengan adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah bagi daerah namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Untuk itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan yaitu, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.

Berdasarkan pandangan yang diungkapkan oleh Pamudji dalam Kaho (1998: 124) menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Sumber daya keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian masalah keuangan merupakan masalah penting dalam setiap kegiatan pemerintah di dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah karena tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya, selain itu faktor keuangan ini merupakan faktor penting di dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Kemampuan daerah yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi Pemerintah Pusat.

Musgrave dan Musgrave (1993: 6 – 13) mengemukakan bahwa pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar. Tatanan pemerintah yang mengarah pada diperluasnya otonomi daerah, menuntut kemandirian daerah di dalam mengatur dan menetapkan kebijakan pemerintahan di daerah menurut prakasa dan aspirasi masyarakat. Untuk mempersiapkan kemandirian daerah tersebut, yang harus dilakukan daerah adalah dengan memperkuat struktur perekonomiannya sehingga pemerintah daerah harus dapat memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai. Untuk itu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan menggali sumber-sumber keuangannya agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya, Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, hampir sepuluh tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1. Realisasi dan Persentase PAD dan Dana Perimbangan pada Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Selatan Tahun 2007**

No	Propinsi	PAD	Dana Perimbangan	Total Penerimaan Daerah	%PAD/Total Penerimaan Daerah
1	SUMSEL	847.970.551.231,39	1.287.844.493.483,00	2.135.815.044.714,39	39,70
2	LAMPUNG	674.693.661.673,11	699.402.387.587,17	1.374.096.049.260,28	49,10
3	BABEL	203.541.902.473,45	406.325.954.235,00	609.867.856.708,45	33,37
4	JAMBI	451.050.873.390,42	704.299.703.877,00	1.155.350.577.267,42	39,04
5	BENGKULU	311.228.346.169,00	891.312.487.004,00	1.202.540.833.173,00	25,88

Sumber: Biro Keuangan masing-masing Propinsi (data diolah)

Dari Table 1. di atas dapat dilihat bahwa Propinsi Lampung mempunyai persentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah yang terbesar dibandingkan dengan propinsi

lainnya yaitu sebesar 49,10 persen dengan kategori baik, sedangkan Propinsi Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung masing-masing sebesar 39,70 persen, 39,04 persen dan 33,37 persen dengan kategori cukup. Propinsi Bengkulu menunjukkan presentase ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan Pemerintah pusat dengan persentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah sebesar 25,88 persen yaitu kriteria sedang.

Selanjutnya berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data atau informasi keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Informasi keuangan yang dimaksud adalah berupa penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sebagai salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 31 yang mengatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (Nordiawan, 2006: 34). Agar laporan keuangan pemerintah daerah bermanfaat untuk pengambilan keputusan, maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, handal dan dapat dipahami (PP No. 24 Tahun 2005: 38)

Dalam prakteknya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah banyak mengalami kendala antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, sistem akuntansi yang belum didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan kebijakan akuntansi yang belum dilandasi oleh Peraturan Kepala Daerah untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan juga terbatasnya pemahaman aparat terhadap laporan keuangan. Wujud dari keterbatasan tersebut dapat dilihat dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagian besar wajar dengan pengecualian (Suwarno, 2007: 2).

Selain kewajiban menyampaikan laporan keuangan yang sesuai PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, juga perlu dilakukan penilaian apakah

Pemerintah Daerah yang bersangkutan berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2004: 148).

Penggunaan analisis rasio laporan keuangan sebagai alat analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik, khususnya pemda masih sangat terbatas. Padahal dari analisis rasio laporan keuangan pemda dapat diketahui bagaimana kinerja pemda yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kinerja pemda sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul : “ Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumbagsel.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Keuangan daerah**

Faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Usman (1998: 63) mengatakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “*self supporting*” dalam bidang keuangan. Halim (2007: 230) mengungkapkan bahwa kemampuan pemda dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemda adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah, 1995: 16).

Dari pengertian tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu :

1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah;
2. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana/modal untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang publik (*publik goods*) dan jasa pelayanannya. Menurut Kunarjo (1996: 181) bahwa untuk melaksanakan pembangunan prasarana, pemerintah daerah dapat membiayai dari sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun pinjaman daerah. Karena kecilnya pendapatan asli daerah dibanding dengan kebutuhan pembangunan maka dalam beberapa hal pemerintah daerah memerlukan pinjaman untuk digunakan pada proyek-proyek yang dapat menghasilkan pendapatan.

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986: 199).

Organisasi sektor publik (Pemerintah) merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan karena masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik. Sehingga pemerintah tidak hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat saja, tetapi juga kepada masyarakat luas. Oleh karena itulah diperlukan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002: 121) :

1. Memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak mudah, karena menyangkut masalah kemampuan daerah itu sendiri dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan beserta pelaksanaan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, masalah kemampuan daerah berarti menyangkut masalah bagaimana daerah dapat memperoleh dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya. Menurut Prabowo (1999: 4) sesuai dengan konsep asas desentralisasi dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah sangat dibutuhkan dana dan sumber-sumber pembiayaan yang cukup memadai, karena kalau daerah tidak mempunyai sumber keuangan yang cukup akibatnya tergantung terus kepada pemerintah pusat.

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh Pemerintah Daerah, kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari pemerintah daerah sendiri (Hirawan, 1990: 26). Dengan demikian maka perlu mengetahui apakah suatu daerah itu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka kita harus mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Syamsi, 1986: 99).

1. Kemampuan struktural organisasinya.

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

### 3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

### 4. Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selain faktor alam, tenaga kerja, dan teknologi, maka salah satu faktor utama lainnya adalah faktor kapital, yang biasa disebut sumber daya modal atau *capital resources*. Dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa penerimaan daerah merupakan sumber modal, yang dihimpun dan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah (Soediyono, 1992: 7). Selanjutnya Davey (1988: 258) mengungkapkan bahwa otonomi daerah menuntut adanya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang tidak tergantung kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

### **Analisis Rasio Keuangan**

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007: 231).

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002: 169). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2007: 233) yaitu rasio



kemandirian, rasio efektifitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pemda (Halim,2007: 232) adalah :

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2. Pihak Eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemda, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

### **Penelitian Sebelumnya**

Menurut Yamin (2000: 48) dengan penelitiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di provinsi Irian Jaya, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh relatif kecil terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan pendapatan perkapita berpengaruh relatif besar terhadap kinerja keuangan daerah. Faktor yang teliti yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per-kapita, dengan menggunakan metode analisis metode ekonometrika dengan menggunakan metode linier dinamis atau *partial adjustment model* dan metode kuadrat terkecil.

Selanjutnya Samson (2001: 41) melakukan penelitian tentang indikator-indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barito Kuala 1995/1996 – 1999/2000. Indikator yang dimaksud adalah indikator kinerja efektifitas, efisiensi, rasio investasi (COR) dan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menggambarkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Barito Kuala menunjukkan hasil rata-rata sangat efektif yang ditunjukkan dengan rasio efektifitas 104 persen dan sangat efisien yang ditunjukkan dengan rasio efisiensi 51 persen.

Selanjutnya Simatupang (2007: 88) melakukan penelitian mengenai evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan indikator efektifitas, efisiensi, perkembangan APBD dan kemampuan keuangan daerah, dengan hasil penelitian bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peringkat terbaik atas evaluasi APBD yang dilakukan sedangkan Kabupaten Musi Rawas berada pada peringkat terendah. Selain itu juga digunakan uji beda *Kolmogorof Smirnov* dengan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan akan evaluasi pelaksanaan APBD antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Selanjutnya berdasarkan *Mann-Whitney Test* secara statistik tidak terdapat perbedaan

evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten dan kota, dan tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten/kota pemekaran dengan kabupaten/kota non pemekaran.

Selanjutnya Diana (2008: 72) melakukan penelitian mengenai analisis kinerja atas laporan keuangan pemerintah propinsi se-Sumatera Bagian Selatan dengan indikator kemandirian keuangan daerah, efektifitas, efisiensi, aktivitas dan perkembangan APBD. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk melihat urutan peringkat evaluasi pelaksanaan laporan keuangan pemda propinsi Se-Sumbagsel dan untuk melihat elastisitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa propinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat pertama dalam evaluasi pelaksanaan laporan keuangan Pemda dan hasil analisis elastisitas menunjukkan secara rata-rata kelima propinsi memiliki nilai elastisitas pendapatan asli daerah yang inelastis. Selain itu juga digunakan uji beda *Kolmogorof Smirnov* dengan hasil bahwa terdapat perbedaan yang nyata atas evaluasi pelaksanaan Laporan Keuangan pada Propinsi se-Sumatera bagian Selatan.

Selanjutnya Lindawati (2001: 49) yang melakukan penelitian mengenai kemampuan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta dalam melakukan pinjaman. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keuangan daerah DKI Jakarta mampu memberikan dana netto yang disisihkan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman sehubungan dengan pelaksanaan pembangunannya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Debt Service Coverage Rasio (DSCR) rata-rata per tahun sebesar 17,17 di atas ambang batas yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2,5. selanjutnya dengan analisis Batas Maksimum pinjaman (BMP) pemerintah Daerah DKI Jakarta mampu untuk melakukan pinjaman yang lebih besar lagi.

Selanjutnya Erwansyah (2003: 55) pada penelitiannya tentang pengaruh tingkat hutang terhadap kinerja keuangan dan rasio harga saham perusahaan publik kelompok Jakarta Islamic Index menyatakan bahwa tingkat hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan terhadap harga saham tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Indikator kinerja keuangan yang digunakan adalah rasio leverage, ROE dan ROI. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analitik kuantitatif dengan analisa regresi linier sederhana dari tahun 1995 hingga tahun 2000.

Selanjutnya Pasrah (2007: 198) telah melakukan penelitian tentang analisis kinerja dan kemandirian keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa rasio kemandirian

keuangan daerah Sumatera Selatan cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertahun adalah 48,50 persen. Selanjutnya variabel kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

### **Kerangka Pemikiran**

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis perbandingan indikator kinerja keuangan Pemerintah Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan yang terdiri dari indikator kemandirian daerah, efektifitas dan aktivitas keuangan daerah. Dari tiga indikator ini akan dilakukan pemeringkatan kinerja keuangan pemerintah propinsi se Sumbagsel. Selanjutnya juga akan dilihat perubahan kinerja keuangan kelima propinsi di Sumatera Bagian Selatan, apakah semakin meningkat, menurun, stabil atau berfluktuasi. Selanjutnya dalam penelitian ini juga akan dilihat apakah ada perbedaan kinerja keuangan di Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan.

### **Hipotesis**

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka pikir di atas maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

”Terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah pada lima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan”.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada lima propinsi di Sumatera Bagian Selatan, yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung dengan pertimbangan selama ini masih jarang peneliti melakukan penelitian untuk tingkat propinsi se-Sumatera Bagian Selatan dengan objek penelitian Laporan Keuangan pada lima propinsi tersebut. Variabel kinerja keuangan daerah yang akan diteliti meliputi tiga indikator, yaitu kemandirian daerah, efektifitas, dan aktifitas keuangan daerah pada tahun 2004 sampai dengan 2007. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada propinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

### **Definisi Operasional Data**

1. Kinerja keuangan pemda adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi,1986: 199).
2. Kemandirian adalah kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahmudi, 2007: 128).
3. Efektifitas adalah kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Mahmudi, 2007: 129).
4. Aktifitas keuangan daerah adalah bagaimana pemda memperoleh dan membelanjakan pendapatan daerahnya.

### **Analisis Kemandirian Daerah**

Analisis kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Rumusan rasio kemandirian daerah yaitu :

$$\text{Kemandirian } i = \frac{\text{PAD } i}{\text{Total Pendapatan Daerah } i}$$

Ket : *i* = Lima propinsi se-Sumbagsel : Sumsel, Lampung, Babel, Jambi dan Bengkulu.

Selanjutnya kriteria kemampuan keuangan daerah dapat dikategorikan sangat baik jika nilai rasio kemandiriannya diatas 50 persen, baik jika nilai rasio 40-50 persen, cukup jika nilai rasio 30-40 persen, sedang jika nilai rasio 20-30 persen, kurang jika nilai rasio 10-20 persen dan sangat kurang jika nilai rasio 0-10 persen.

### **Analisis Efektifitas**

Analisis efektifitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan. Rumusan rasio efektifitas yaitu :

$$\text{Efektifitas } i = \frac{\text{Realisasi PAD } i}{\text{Target Penerimaan PAD } i}$$

Ket :  $i$  = Lima propinsi se-Sumbagsel : Sumsel, Lampung, Babel, Jambi dan Bengkulu.

Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 kriteria nilai efektivitas keuangan daerah dapat dikatakan sangat efektif jika nilai rasionya di atas 100 persen, efektif jika nilai rasionya 90-100 persen, cukup efektif jika nilai rasionya 80-90 persen, kurang efektif jika nilai rasionya 60-80 persen dan tidak efektif jika nilai rasionya kurang dari 60 persen.

### **Analisis Aktifitas**

#### **a. Rasio Keresasian**

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan publik secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti persentase belanja pelayanan publik (belanja modal) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Selanjutnya pada penelitian ini secara sederhana, rasio keserasian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Belanja Aparatur daerah} = \frac{\text{Belanja Aparatur daerah terhadap APBD } i}{\text{Total APBD } i}$$

$$\text{Belanja Pelayanan Publik} = \frac{\text{Total Belanja Pelayanan Publik } i}{\text{Total APBD } i}$$

Ket :  $i$  = Lima propinsi se-Sumbagsel : Sumsel, Lampung, Babel, Jambi dan Bengkulu.

Karena belum ada tolok ukur yang jelas mengenai rasio keserasiaan pemerintah daerah saat ini maka untuk membandingkan rasio keserasian pemerintah daerah se-Sumatera Bagian Selatan pada penelitian ini dilakukan penghitungan rata-rata belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik selama tahun penelitian.

### **b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**

Analisis DSCR untuk melihat kemampuan pemda dalam menggunakan alternatif sumber dana lain melalui pinjaman, nilai DSCR minimal 2,5. Rumusan untuk menghitung DSCR adalah sebagai berikut :

$$DSCR i = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{\text{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}}$$

Keterangan :

DSCR *i* = *Debt Service Coverage Ratio* Lima propinsi se-Sumbagsel

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib

### **Analisis Uji Beda *Kolmogorof Smirnov***

*Kolmogorof Smirnov* dilakukan untuk uji beda dengan satu sampel. Pada penelitian ini *Kolmogorof Smirnov* dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan. Untuk mengetahui hal tersebut di atas diuji dengan hipotesis sebagai berikut :

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah pada lima propinsi se-Sumatera bagian Selatan.

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah pada lima propinsi se-Sumatera bagian Selatan.

Menurut Sugianto (2007: 318) jika nilai *asympt sig (asymptotic significance)* hasil pengujian lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima, sebaliknya jika *asympt sig* hasil pengujian kurang dari 0,05 maka Ha diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan dan perubahan kinerja keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Selatan. Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, dilakukan dengan menggunakan tiga indikator kinerja, antara lain kemandirian keuangan daerah, efektifitas, dan aktifitas keuangan daerah. Selanjutnya aktifitas keuangan daerah dilihat melalui rasio keserasian keuangan daerah dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan. Aktifitas keuangan daerah menunjukkan keserasian Pemda dalam mengalokasikan antara belanja aparatur dan belanja pelayanan publik serta kemampuan Pemda dalam membayar hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari lima pemerintah propinsi se-Sumatera Bagian Selatan hanya Pemerintah Propinsi Lampung saja yang sudah melakukan pengukuran kinerja keuangan daerahnya dengan menggunakan perhitungan rasio. Empat pemerintah propinsi lainnya masih mengukur kinerja keuangan dengan cara membandingkan antara realisasi dan target APBD.

### Kemandirian Keuangan Daerah

Nilai kemandirian keuangan daerah pada lima propinsi terlihat pada Tabel 4.1. Berdasarkan Tabel 2. dapat dilihat bahwa Propinsi Lampung memiliki nilai kemandirian paling tinggi diantara lima propinsi di Sumatera Bagian Selatan secara konsisten dari tahun 2004 sampai 2007 dengan nilai rata-rata 50,11 dan klasifikasi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah di Propinsi Lampung memberikan kontribusi yang paling besar bagi total pendapatan daerahnya dibandingkan dengan empat propinsi lainnya. Dapat dilihat di atas bahwa pendapatan asli daerah ke-lima propinsi di Sumbagsel mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai 2007, namun nilai kemandirian masing-masing propinsi tidak serta merta naik, melainkan berfluktuasi.

**Tabel 2. Nilai Kemandirian Keuangan Daerah Pada Lima Propinsi di Sumatera Bagian Selatan tahun 2004-2007**

Keterangan	2004	2005	2006	2007	Rerata
<b>1 Sumsel :</b>					Nilai
Realisasi PAD (Rp)	493.132.547.174,17	590.860.840.160,35	741.957.493.216,78	847.970.551.231,39	668.480.357.945,67
Total Pendapatan Daerah (Rp)	1.088.213.436.390,85	1.388.170.596.526,23	1.866.212.730.609,37	2.135.815.044.714,39	1.619.602.952.060,21
Rasio kemandirian(%)	45,32	42,56	39,76	39,70	41,83
Klasifikasi	Baik	Baik	Cukup	Cukup	Baik
Peringkat	3	4	2	2	3
<b>2 LAMPUNG :</b>					
Realisasi PAD(Rp)	410.682.087.702,42	549.657.847.500,47	631.981.955.887,68	674.693.661.673,11	566.753.888.190,92
Total Pendapatan Daerah (Rp)	821.457.219.696,42	1.045.903.177.788,47	1.294.948.833.025,09	1.374.096.049.260,28	1.134.101.319.942,57
Rasio kemandirian(%)	49,99	52,55	48,80	49,10	50,11
Klasifikasi	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
Peringkat	1	1	1	1	1
<b>3 BABEL</b>					
Realisasi PAD(Rp)	114.461.630.239,10	188.304.373.606,31	198.173.311.840,39	203.541.902.473,45	176.120.304.539,81
Total Pendapatan Daerah (Rp)	327.658.234.735,96	436.728.366.069,31	534.173.639.127,97	609.867.856.708,45	477.107.024.160,42
Rasio kemandirian(%)	34,93	43,12	37,10	33,37	37,13
Klasifikasi	Cukup	Baik	Cukup	Cukup	Cukup
Peringkat	4	3	4	4	4
<b>4 JAMBI</b>					
Realisasi PAD(Rp)	285.932.959.949,34	344.880.739.493,00	385.042.832.573,97	451.050.873.390,42	366.726.851.351,68
Total Pendapatan Daerah (Rp)	630.144.009.672,89	748.820.793.086,00	1.010.116.940.975,97	1.155.350.577.267,42	886.108.080.250,57
Rasio kemandirian(%)	45,38	46,06	38,12	39,04	42,15
Klasifikasi	Baik	Baik	Cukup	Cukup	Baik
Peringkat	2	2	3	3	2
<b>5 BENGKULU</b>					
Realisasi PAD(Rp)	106.575.379.841,27	122.165.594.725,19	165.100.789.825,09	311.228.346.169,00	176.267.527.640,14
Total Pendapatan Daerah (Rp)	354.211.795.187,27	391.315.589.096,19	556.308.031.525,43	1.202.540.833.173,00	626.094.062.245,47
Rasio kemandirian(%)	30,09	31,22	29,68	25,88	29,22
Klasifikasi	Cukup	Cukup	Sedang	Sedang	Sedang
Peringkat	5	5	5	5	5

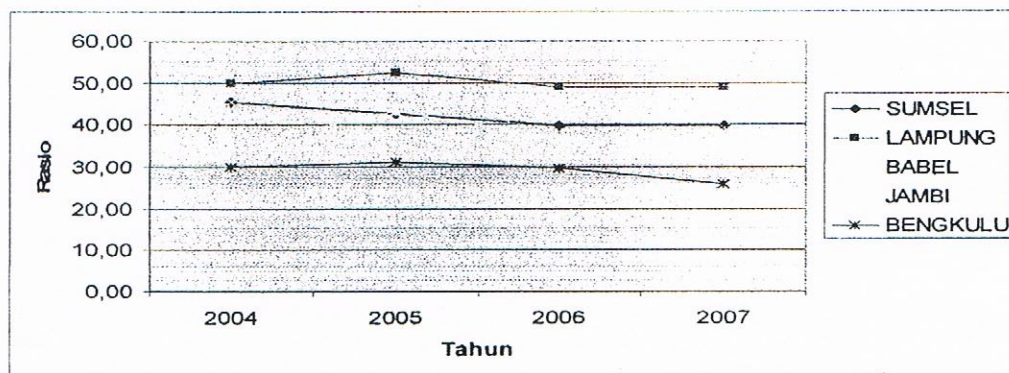
Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Sumbagsel (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2. di atas juga dapat dilihat bahwa Propinsi Bengkulu memiliki nilai kemandirian terendah secara berturut-turut dari tahun 2004 sampai 2007 dibandingkan empat propinsi lainnya di Sumbagsel. Hal ini dinilai wajar jika dibandingkan dengan ke-empat propinsi lainnya, Propinsi Bengkulu memang memiliki pendapatan asli daerah yang paling sedikit. Salah satunya penyebabnya adalah dikarenakan Propinsi Bengkulu memiliki sumber daya alam yang terbatas, sehingga potensi untuk menghasilkan pendapatan asli daerah relatif kecil dibandingkan propinsi lain di Sumatera Bagian Selatan.



Sebaliknya, hal ini tidak berlaku pada Propinsi Sumatera Selatan, dengan pendapatan asli daerah yang menunjukkan angka paling besar diantara ke-lima propinsi namun tidak membuat nilai kemandirian propinsi ini menjadi sangat baik. Secara rata-rata Propinsi Sumatera Selatan hanya menduduki peringkat ke-tiga untuk kemandirian keuangan daerahnya, yang berada di bawah Lampung dan Jambi.

Selanjutnya, untuk lebih jelasnya perubahan kemandirian keuangan daerah pemerintah se-Sumatera Bagian Selatan dapat dilihat pada Gambar 1. di bawah ini:



**Gambar 1. Kemandirian Keuangan Pemerintah Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan**

Selanjutnya fenomena di atas menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah pada lima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan masuk dalam klasifikasi cukup atau sebesar 37,42 persen.

#### **Efektifitas Keuangan Daerah**

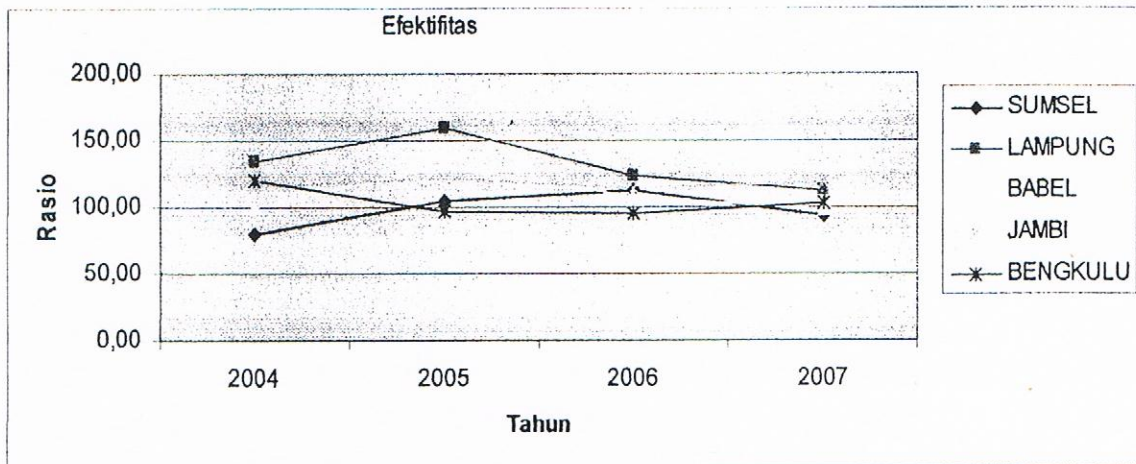
Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa propinsi yang menunjukkan kemampuan merealisasikan pencapaian pendapatan asli daerah melebihi dari target penerimaan yang dianggarkan untuk tahun 2004 sampai tahun 2007 adalah Propinsi Lampung, Bangka Belitung dan Jambi. Sedangkan Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 2005 dan 2006 sebenarnya menunjukkan kemampuan merealisasikan pencapaian target pendapatan asli daerah melebihi dari target penerimaan yang dianggarkan namun tidak pada tahun 2004 dan 2007. Untuk Propinsi Bengkulu, pada tahun 2004 dan 2007 menunjukkan kemampuan pencapaian pendapatan asli daerah melebihi dari target penerimaan yang dianggarkan namun tidak pada tahun 2005 dan 2006.

**Tabel 3. Nilai Efektifitas Keuangan Daerah Pada Lima Propinsi di Sumatera Bagian Selatan tahun 2004-2007**

Keterangan	2004	2005	2006	2007	Rerata
1 Sumsel :					Nilai
Realisasi PAD (Rp)	493.132.547.174,17	590.860.840.160,35	741.957.493.216,78	847.970.551.231,39	668.480.357.945,67
Target PAD(Rp)	614.782.613.047,00	566.730.452.778,00	663.987.566.286,00	897.156.597.700,00	685.664.307.452,75
Rasio efektifitas(%)	80,21	104,26	111,74	94,52	97,68
Klasifikasi	Cukup Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Efektif
Peringkat	5	4	3	5	5
2 LAMPUNG :					
Realisasi PAD (Rp)	410.682.087.702,42	549.657.847.500,47	631.981.955.887,68	674.693.661.673,11	566.753.888.190,92
Target PAD(Rp)	305.117.936.425,00	346.266.831.315,00	512.215.692.440,00	602.552.662.400,00	441.538.280.645,00
Rasio efektifitas(%)	134,60	158,74	123,38	111,97	132,17
Klasifikasi	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Peringkat	1	1	1	2	1
3 BABEL					
Realisasi PAD (Rp)	114.461.630.239,10	188.304.373.606,31	198.173.311.840,39	203.541.902.473,45	176.120.304.539,81
Target PAD(Rp)	114.368.223.031,10	143.841.111.660,00	184.130.285.650,00	206.573.771.759,00	162.228.348.025,03
Rasio efektifitas(%)	100,08	130,91	107,63	98,53	109,29
Klasifikasi	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Sangat Efektif
Peringkat	4	2	4	4	3
4 JAMBI					
Realisasi PAD (Rp)	285.932.959.949,34	344.880.739.493,00	385.042.832.573,97	451.050.873.390,42	366.726.851.351,68
Target PAD(Rp)	246.236.225.716,00	283.589.737.270,00	336.590.283.408,00	382.082.234.637,00	312.124.620.257,75
Rasio efektifitas(%)	116,12	121,61	114,40	118,05	117,54
Klasifikasi	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Peringkat	3	3	2	1	2
5 BENGKULU					
Realisasi PAD (Rp)	106.575.379.841,27	122.165.594.725,19	165.100.789.825,09	311.228.346.169,00	104.046.283.598
Target PAD(Rp)	88.873.585.129,00	125.925.771.480,00	172.957.208.978,00	303.547.500.000,00	172.826.016.397
Rasio efektifitas (%)	119,92	97,01	95,46	102,53	103,73
Klasifikasi	Sangat Efektif	Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Peringkat	2	5	5	3	4

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Sumbagsel (data diolah)

Selanjutnya perubahan tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada lima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan dapat dilihat lebih jelas melalui Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2. dapat dilihat bahwa tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah ke lima pemerintah propinsi di Sumatera Bagian Selatan adalah berfluktuasi. Tidak ada satupun pemerintah propinsi yang nilai efektifitasnya terus naik atau terus turun dari tahun 2004 sampai 2007. Namun jelas terlihat pada gambar tersebut bahwa pada tahun 2004 nilai efektifitas pengelolaan keuangan daerah Propinsi Sumatera Selatan berada di bawah empat pemerintah propinsi lainnya, yaitu hanya sebesar 80,21 persen dan secara rata-rata selama empat tahun tersebut nilai efektifitasnya 97,68 persen.



**Gambar 2. Efektifitas Keuangan Pemerintah Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan**

### Aktifitas Keuangan Daerah

#### a. KecerAsian Keuangan Daerah

Berdasarkan Tabel 4. Propinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bangka-Belitung dan Jambi memiliki nilai rasio belanja aparatur daerah di bawah nilai rata-rata, hanya Propinsi Bengkulu saja yang nilai rasio belanja aparatur daerahnya di atas nilai rata-rata ditunjukkan dengan nilai 46,20 persen. Selanjutnya pada tahun 2007, nilai rata-rata rasio belanja aparatur daerah merupakan nilai rata-rata tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 59,75 persen. Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu menunjukkan nilai rasio aparatur daerah di bawah nilai rata-rata yaitu 45,31 persen dan 21,84 persen. Jika dilihat selama kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2007, rata-rata rasio belanja daerah pemerintah Propinsi se-Sumatera Selatan adalah 56,27 persen dan Propinsi Sumatera selatan dan Bangka-Belitung yang memiliki nilai di bawah rata-rata, yaitu masing-masing sebesar 43,24 persen dan 51,80 persen. Pada rasio keserasian ini sebenarnya menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan belanjanya disesuaikan pada kebutuhan daerah yang bersangkutan. Namun demikian sebagai daerah di negara yang mempunyai misi menciptakan pemerintahan yang *good goverment governance*, peranan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik harus selalu diupayakan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa Propinsi Sumatera Selatan merupakan propinsi yang nilai rasio belanja aparatur daerahnya selalu di bawah rata-rata dan nilai rasio belanja pelayanan publiknya selalu berada di atas rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa propinsi Sumatera Selatan jika dibandingkan dengan propinsi lainnya di Sumatera Bagian Selatan merupakan propinsi yang lebih mengutamakan belanja

pelayanan publik daripada belanja aparatur daerah. Hal ini merupakan suatu yang menarik bila dikaitkan dengan pendapatan asli daerahnya, Sumatera Selatan memang memiliki PAD terbesar dibandingkan dengan propinsi lainnya.

**Tabel 4. Nilai Rasio Keserasian Keuangan Daerah Pada Lima Propinsi di Sumatera Bagian Selatan tahun 2004-2007**

Keterangan		2004	2005	2006	2007
1	Sumsel :				
	Tot.Belanja Aparatur Daerah	364.016.637.358,07	353.398.321.124,00	475.803.552.479,79	967.654.510.157,00
	Tot.Belanja Pelayanan Publik	550.720.976.445,29	352.881.426.832,18	745.496.626.368,45	984.279.768.855,00
	Total APBD	1.088.213.436.390,85	1.388.170.596.526,23	1.866.212.730.609,37	2.135.815.044.714,39
	Rasio belanja Aparatur	33,45	25,46	25,50	45,31
	Rasio belanja pelayanan publik	50,61	25,42	39,95	46,08
2	LAMPUNG :				
	Tot.Belanja Aparatur Daerah	206.501.926.878,30	571.940.377.800,44	347.248.010.844,60	872.154.848.470,47
	Tot.Belanja Pelayanan Publik	544.606.823.770,20	119.927.281.016,00	113.552.751.939,00	263.015.495.721,80
	Total APBD	821.457.219.696,42	1.045.903.177.788,47	1.294.948.833.025,09	1.374.096.049.260,28
	Rasio belanja Aparatur	25,14	54,68	26,82	63,47
	Rasio belanja pelayanan publik	66,30	11,47	8,77	19,14
3	BABEL				
	Tot.Belanja Aparatur Daerah	96.666.930.170,67	117.139.517.097,51	142.096.218.927,93	441.915.816.645,43
	Tot.Belanja Pelayanan Publik	87.019.778.310,31	22.086.847.000,00	142.335.529.479,93	194.509.410.249,69
	Total APBD	327.658.234.735,96	436.728.366.069,31	534.173.639.127,97	609.867.856.708,45
	Rasio belanja Aparatur	29,50	26,82	26,60	72,46
	Rasio belanja pelayanan publik	26,56	5,06	26,65	31,89
4	JAMBI				
	Tot.Belanja Aparatur Daerah	329.434.287.473,71	226.473.779.804,00	277.848.320.794,00	1.105.387.893.927,00
	Tot.Belanja Pelayanan Publik	251.998.560.567,00	287.350.978.140,00	363.907.568.394,00	422.441.973.161,00
	Total APBD	630.144.009.672,89	748.820.793.086,00	1.010.116.940.975,97	1.155.350.577.267,42
	Rasio belanja Aparatur	52,28	30,24	27,51	95,68
	Rasio belanja pelayanan publik	39,99	38,37	36,03	36,56
5	BENGGULU				
	Tot.Belanja Aparatur Daerah	236.632.776.245,00	188.931.557.909,31	257.017.955.866,00	262.692.860.135,00
	Tot.Belanja Pelayanan Publik	46.276.108.304,00	97.361.127.397,44	105.193.821.879,00	189.714.611.340,00
	Total APBD	354.211.795.187,27	391.315.589.096,19	556.308.031.525,43	1.202.540.833.173,00
	Rasio belanja Aparatur	66,81	48,28	46,20	21,84
	Rasio belanja pelayanan publik	13,06	24,88	18,91	15,78

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Sumbagsel (data diolah)

### **b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain seperti pinjaman. Untuk dapat melihat kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman dapat dilakukan dengan menghitung *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), artinya bahwa apakah pemerintah daerah layak atau tidak untuk melakukan pinjaman. Pemerintah daerah yang layak melakukan pinjaman harus mempunyai nilai DSCR minimal 2,5. Berdasarkan hasil nilai DSCR pada masing-masing propinsi terlihat pada Tabel 5. menunjukkan bahwa hanya Propinsi Sumatera Selatan yang mempunyai angsuran pokok hutang pada tahun 2005, 2006 dan 2007 yaitu pembayaran hutang kepada PT. Bank Sumsel, PT. Nindya Karya, PT. Bukit Asam dan hutang pajak pada Kas Negara. Dapat dilihat bahwa nilai DSCR Propinsi Sumatera Selatan diatas 2,5 pada tahun 2005 sampai dengan 2007, hal ini menunjukkan bahwa propinsi yang bersangkutan sangat mampu untuk melakukan pembayaran jika melakukan pinjaman. Selanjutnya ke-empat propinsi lainnya tidak ada pembayaran pokok angsuran hutang pada kurun waktu 2004 sampai dengan 2007, artinya bahwa ke-empat propinsi tersebut tidak melakukan pinjaman. Hal ini dapat dimaklumi karena pemerintah daerah masih dapat mencukupi untuk membiayai pengeluarannya atau pemda tidak perlu melakukan pinjaman, selain itu juga prosedur untuk melakukan pinjaman kepada pihak luar relatif sulit antara lain harus melalui Departemen Keuangan dan adanya persetujuan dari DPRD. Dari Tabel 4.4 juga dapat dikatakan bahwa walaupun ke-empat propinsi tersebut tidak mempunyai hutang, pemda mempunyai kemampuan untuk melakukan pinjaman jika dilihat dari kemampuan pemda untuk membayar kembali hutangnya yang berasal dari jumlah pendapatan daerah yang diterima setelah dikurangi dengan belanja wajibnya. Selain itu berdasarkan Tabel 4.4 di bawah ini juga dapat dilihat bahwa Batas Maksimal Pinjaman yang boleh diajukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan sangat tergantung pada besarnya total pendapatan daerah tersebut. Pemerintah daerah dengan BMP terbesar adalah Propinsi Sumatera Selatan

**Tabel 5. Nilai DSCR, Angsuran Maksimal dan Pinjaman Maksimal yang bisa dilakukan pada Ke-Lima Propinsi di Sumatera Bagian Selatan tahun 2004-2007**

Keterangan		2004	2005	2006	2007
1	Sumssel :				
	(PAD+BD+DAU)-BW	837.454.366.598,78	928.989.759.688,23	1.493.698.506.056,58	238.916.745.748,39
	Total (Pokok Angsuran + Bunga + By Pinjaman)	-	49.502.448.000,00	4.044.501.200,00	3.440.299.200,00
	Rasio dscr	-	18,77	369,32	69,45
	Angsuran Maks	334.981.746.639,51	371.595.903.875,29	597.479.402.422,63	95.566.698.299,36
	BMP	-	816.160.077.293,14	1.041.127.947.394,67	1.399.659.547.957,03
2	LAMPUNG :				
	(PAD+BD+DAU)-BW	664.505.418.094,12	811.631.534.816,99	97.769.919.755,09	489.323.608.694,11
	Total (Pokok Angsuran + Bunga + By Pinjaman)	-	-	-	-
	Rasio dscr	-	-	-	-
	Angsuran Maks	265.802.167.237,65	324.652.613.926,80	39.107.967.902,04	195.729.443.477,64
	BMP	-	616.092.914.772,32	784.427.383.341,35	971.211.624.768,82
3	BABEL				
	(PAD+BD+DAU)-BW	249.799.681.266,85	352.199.632.667,97	429.574.940.181,04	291.799.899.444,54
	Total (Pokok Angsuran + Bunga + By Pinjaman)	-	-	-	-
	Rasio dscr	-	-	-	-
	Angsuran Maks	99.919.872.506,74	140.879.853.067,19	171.829.976.072,42	116.719.959.777,82
	BMP	-	245.743.676.051,97	327.546.274.551,98	400.630.229.345,98
4	JAMBI				
	(PAD+BD+DAU)-BW	437.383.770.074,89	556.211.579.558,00	801.665.613.748,97	582.974.088.130,00
	Total (Pokok Angsuran + Bunga + By Pinjaman)	-	-	-	-
	Rasio dscr	-	-	-	-
	Angsuran Maks	174.953.508.029,96	222.484.631.823,20	320.666.245.499,59	233.189.635.252,00
	BMP	-	472.608.007.254,67	561.615.594.814,50	757.587.705.731,98
5	BENGGKULU				
	(PAD+BD+DAU)-BW	169.929.013.859,27	187.377.791.186,88	286.132.833.959,09	513.432.038.951,00
	Total (Pokok Angsuran + Bunga + By Pinjaman)	-	-	-	-
	Rasio dscr	-	-	-	-
	Angsuran Maks	67.971.605.543,71	74.951.116.474,75	114.453.133.583,64	205.372.815.580,40
	BMP	-	265.658.846.390,45	293.486.691.822,14	417.231.023.644,07

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Sumbagsel (data diolah)

Ket : PAD (Pendapatan Asli Daerah), BD (Bagian Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum), BW (Belanja Wajib)

### Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan

Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pemerintah Propinsi se-Sumbagsel Data yang digunakan untuk uji beda *Kolmogorov Smirnov Test* disajikan pada Tabel 4.5. Pada Tabel 6. di bawah ini, dapat dilihat kinerja keuangan pemerintah Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan dengan tiga indikator yaitu kemandirian, efektifitas dan aktifitas keuangan daerah. Berdasarkan pada Tabel 4.5 juga dapat dilihat bahwa Indikator aktifitas

keuangan daerah hanya menampilkan nilai rasio belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik, untuk nilai *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) tidak ditampilkan karena hanya Propinsi Sumatera Selatan saja yg mempunyai nilai DSCR sedangkan empat Propinsi lainnya tidak sehingga tidak bisa dibandingkan.

**Tabel 6. Data Kinerja Keuangan  
Pemerintah Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan Tahun 2004-2007 (%)**

No	Propinsi	Kemandirian	Efektifitas	Aktifitas		Rerata	Peringkat
				Belanja Aparatur Dearah	Belanja Pelayanan Publik		
1	Sumsel	41,84	97,68	32,43	40,52	53,12	3
2	Lampung	50,11	132,17	42,53	26,42	63,81	1
3	Babel	37,13	109,29	38,85	22,54	51,95	4
4	Jambi	42,15	117,55	51,43	37,74	62,22	2
5	Bengkulu	29,22	103,73	45,78	18,16	49,22	5

Sumber : Diolah dari data Laporan Keuangan Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan

Berdasarkan Tabel 6. di atas, dapat dilihat bahwa secara rata-rata kinerja keuangan Propinsi Lampung berada diperingkat pertama dengan 63,81 persen , Propinsi Jambi diperingkat kedua dengan 62,22 persen, Propinsi Sumatera Selatan diperingkat ketiga dengan 53,12 persen, Propinsi Bangka Belitung diperingkat keempat dengan 51,95 persen dan Propinsi Bengkulu berada diperingkat terakhir dengan 49,22 persen. Selanjutnya di bawah ini adalah hasil uji beda *Kolmogorov Smirnov Test*:

**Descriptive Statistics**

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
RERATA	5	55.8640	6.2377	49.22	62.81

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		RERATA
N		5
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	55.8640
	Std. Deviation	6.2377
Most Extreme Differences	Absolute	.270
	Positive	.270
	Negative	-.246
Kolmogorov-Smirnov Z		.604
Asymp. Sig. (2-tailed)		.859

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji beda *Kolmogorov Smirnov Test* di atas menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai *asympt sig* adalah sebesar 0,859. Pada penelitian ini nilai *asympt sig* lebih dari 0,05 maka  $H_0$  diterima. Dengan kata lain  $H_a$  ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah pada lima propinsi se-Sumatera bagian Selatan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil analisis kinerja keuangan daerah terhadap lima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan dengan indikator kemandirian, efektifitas dan aktivitas keuangan daerah dapat diketahui bahwa Propinsi Lampung memiliki peringkat pertama dengan 63,81 persen, peringkat kedua yaitu Propinsi Jambi dengan nilai 62,22 persen, peringkat ketiga yaitu Propinsi Sumatera Selatan dengan 53,12 persen, peringkat keempat yaitu Propinsi Bangka-Belitung dengan 51,95 persen dan Propinsi Bengkulu memiliki peringkat terendah yaitu 49,22 persen. Tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah pada lima Propinsi se-Sumatera Bagian Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa ke-lima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan mempunyai kebijakan keuangan yang hampir serupa antar satu dengan yang lain.

### **Saran**

Pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan hendaknya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan dijadikan rekomendasi atas pelaksanaan Laporan Keuangan pada kelima propinsi di Sumatera bagian Selatan, sebagai bahan koreksi dan masukan untuk peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah maka pemerintah daerah perlu meningkatkan usaha pemungutan pendapatan asli daerah secara lebih intensif dan aktif. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu menetapkan target penerimaan secara lebih baik dengan tidak hanya perkiraan semata, melakukan penyesuaian dengan peraturan yang terkait dengan usaha peningkatan PAD, memperbaiki kinerja BUMD dan mencari sumber-sumber PAD yang baru tanpa harus menunggu ketetapan dari pemerintah pusat. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah adalah perlu dilakukannya perbaikan-perbaikan antara lain berupa peningkatan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan adanya pembinaan yang lebih intensif dari Departemen Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan keuangan daerah di daerah-daerah, apalagi seringkali terjadi perubahan peraturan dibidang



pengelolaan keuangan daerah yang otomatis juga merubah sistem pengelolaan keuangan daerah. Perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai kinerja keuangan daerah pada propinsi di seluruh Indonesia dan dihubungkan dengan variabel lain seperti pinjaman daerah atau kebijakan pemerintah untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan daerah.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Darumurti, K.D dan Rauta, Umbu, 2000, Otonomi Daerah, Kemarin, Hari ini, dan Esok, *Kritis*, Vol. XII, No. 3, 1 - 53.
- Devas Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly. 1999, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (Terjemahan Masri Maris) UI – Press, Jakarta.
- Davey, K.J, 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, UI – Press, Jakarta.
- Erwansyah , 2003, Pengaruh Tingkat Hutang Terhadap Kinerja Keuangan dan Rasio Harga Saham Perusahaan Publik Kelompok Jakarta Islamic Index, Tesis S2 Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta (Tidak Dipublikasikan).
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta:
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Hirawan, Susiati B, 1990, "Keleluasaan daerah atau kontrol pusat?", dalam Arsyad Anwar dan Iwan Jaya Azis (Editor), *Bunga Rampai Ekonomi*, FE UI, Jakarta.
- Kaho, Yosef Riwu, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Kuncoro, Haryo. 2007. "Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Lindawati, Tita, 2001, Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah DKI Jakarta dalam Melakukan Pinjaman. Tesis S2 Pasca Sarjana UGM (Tidak dipublikasikan).
- Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mamesah, D. J., 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta
- Musgrave, Richard A, dan Peggy Musgrave, 1993, *Public Finance in The Theory and Practice* ( Alih Bahasa oleh Alfonsus Sirait), MC-Graw Hill Kogakusha, (Ltd Tokyo).
- Pasrah, Rudi, 2007, Analisis Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, *Kajian Ekonomi*, Vol 6 No.2, 198-221.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006. Depdagri RI
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59, Tahun 2007 tentang Pedoman Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2007. Depdagri RI.

- Riphat Singgih dan Parluhutan Hutahaean. 1997, Strategi Pemantapan Keuangan Daerah dan Kebijakan Desentralisasi : Suatu Analisis tentang Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan, *Jurnal Keuangan dan Moneter*, Vol. 4 No. 2, 7- 41.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 1999, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta
- Simatupang, Paula. *Studi Komparasi Evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang. (tidak dipublikasikan)
- Suwarno, 2007. *Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah daerah dengan Finansial Rasio terhadap Neraca Pemerintah Daerah*. Materi Orasi Ilmiah untuk Pengukuhan Widyaiswara Utama Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia 2007.